

Ketergantungan Perekonomian, Trilogi Pembangunan Indonesia dan Pemilu 2014

Oleh : Zainal Arifin Dalimunthe *)

ABSTRACT

Self-supporting economy, the increasing competitive power and the increasing and strong national defence power are sured to be of increasing performance of current account and balanced of payment in sustainability and further this will toward national economic stability. The ideals hopes will only can be realized if the people, nation and Indonesian state choose their national leadership that is reliable and trustworthy. The general election of President and Vice President on July 9, 2014 will be the testing case to Indonesia people.

PENDAHULUAN

Lingkungan persaingan ekonomi global, merupakan realita dalam kehidupan antar negara di dunia pada saat ini. Seluruh faktor-faktor ekonomi suatu negara, baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Penyebab utama adalah karena ketergantungan ekonomi antar negara di dunia. Walaupun demikian ketergantungan tentu sepatutnya selalu mempertimbangkan kepentingan suatu negara.

Dunia sekarang sedang mengalami resesi terutama akibat resesi berat yang sedang berlangsung di episentrum ekonomi dunia yaitu Uni Eropah dan Amerika Serikat. Sepertinya Indonesia hebat karena ditengah resesi ekonomi dunia tersebut, perekonomian masih tumbuh rata-rata 6%.

Tetapi karena fundamental ekonomi Indonesia relatif lemah, selalu berdampak buruk terhadap nilai mata uang Rupiah kita. Kondisi ini selalu membuat galau dan trauma para pelaku bisnis karena ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Sangat tidak memberikan ketenangan bagi dunia usaha. Sejak pembangunan ekonomi Indonesia secara serius dimulai tahun 1969

hingga saat ini, trauma ketidakstabilan nilai tukar adalah penyakit ekonomi Indonesia yang belum pernah sembuh.

KETERGANTUNGAN EKONOMI

Pada tahun 1965, kondisi ekonomi Indonesia paling tidak sama buruknya dengan kondisi ekonomi negara Afrika dan Asia yang terbelakang pada saat itu. Sejak Maret 1966, Pemerintahan Orde Baru mulai memegang kekuasaan memberikan prioritas utama kepada kebijakan pemulihan roda perekonomian (Hal, 2000). Kebijakan ekonomi Indonesia sejak tahun 1966 dapat dibagi dalam 4 (empat) episode yaitu : i) Rehabilitasi dan Pemulihan, 1966-1970, ii) Pertumbuhan Cepat 1971-1981 iii) Penyesuaian Terhadap Harga Minyak Bumi Yang Rendah 1981-1986, dan iv) Liberalisasi dan Pemulihan Ekonomi, 1987 Hingga Sekarang (Hal Hill,2000).

Sejak episode pertama hingga sekarang telah banyak kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah, diakui memang telah banyak kemajuan yang diraih. Indonesia saat ini sudah termasuk anggota 20 (dua puluh) kekuatan ekonomi dunia karena telah memenuhi kriteria negara yang mempunyai Produk Domestik Bruto (PDB) diatas US\$ 1.000 miliar. Namun ketidakseimbangan ekonomi (unequilibrium

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

economic) masih terus muncul, mengganggu perekonomian oleh karena itu secara riil pertumbuhan ekonomi belum mampu menjadi penopang kestabilan perekonomian Indonesia.

Saat menyusun tulisan ini dunia belum pulih dari resesi terutama akibat resesi berat dan luar biasa yang sedang berlangsung di episentrum ekonomi dunia yaitu Uni Eropah dan Amerika Serikat (AS). Baik AS maupun Area Euro menghadapi persoalan fiskal yang sangat berat. Rasio hutang pemerintah terhadap PDB sangat besar, rata-rata lebih dari 100%. Amerika Serikat dan Area Euro sedang menghadapi beban sosial yang tinggi yang berdampak kepada biaya produksi yang tinggi, dilain pihak negara yang sedang berkembang terutama di Asia telah mampu menguasai teknologi sampai tingkat yang tinggi dan beban sosial relatif rendah maka biaya produksi di negara-negara Asia sangat bersaing dengan produksi dari negara Area Euro dan AS. Oleh sebab itu diperkirakan akan terjadi perubahan atau pergeseran episentrum perekonomian Global dari 2 (dua) episentrum AS dan Area Euro ke episentrum Asia (M. Chatib Basri Dkk, 2012).

Menurut proyeksi yang dibuat oleh PwC (BBC Indonesia, 16 Januari 2013) di dalam laporannya yang berjudul BRIC'S and Beyond, Indonesia akan menyalip Jerman dan Inggris pada tahun 2050. Pertumbuhan di negara-negara seperti India, China, Brasil, Rusia, Indonesia, dan Turki bisa membuat PDB negara-negara tersebut secara kolektif akan lebih besar dari PDB negara-negara yang tergabung di G7 pada tahun 2017. PwC memperkirakan China akan menggeser AS sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2017, atau lebih cepat dari prediksi yang dikeluarkan para ilmuwan China yaitu pada tahun 2019.

Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan Indonesia mengantisipasi pergeseran episentrum ekonomi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat ke Asia ? Apakah mungkin kelak Indonesia dapat menyalib pertumbuhan negara maju seperti Jerman dan Inggris, kalau pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan kurang meyakinkan. Apakah arah perekonomian Indonesia sudah mempunyai strategi yang tepat? Paling sedikit evaluasi atas kinerja transaksi berjalan dan neraca pembayaran Indonesia di bawah ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

a. Evaluasi atas Kinerja Transaksi Berjalan dan Neraca Pembayaran Indonesia 2009-2012

Ketergantungan adalah kata sifat, yaitu sifat membutuhkan bantuan atau pemberian orang lain karena seseorang belum mampu memenuhi atau mengupayakan sendiri kebutuhannya. Oleh sebab itu ketergantungan ekonomi suatu negara kepada negara-negara lain dapat diartikan bahwa negara tersebut secara ekonomi masih membutuhkan bantuan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara tersebut. Konteksnya dengan sifat perekonomian Indonesia adalah sampai hari ini Indonesia, masih perlu bantuan pinjaman untuk membiayai pembangunan baik pinjaman bilateral maupun multilateral bahkan masih mengharapkan hibah. Indonesia masih sangat butuh investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Indonesia harus mengimpor sangat besar barang modal untuk peralatan produksi, masih mengimpor kebutuhan pangan barang konsumsi yang besar dan masih mengimpor produk jasa yang sangat besar.

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

- Pergerakan kinerja transaksi berjalan Indonesia sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 transaksi berjalan positif US\$ 10,628 miliar, pada tahun 2010 turun menjadi positif US\$ 5,643 miliar, pada tahun 2010 turun positif menjadi US\$ 1.685, pada tahun 2012 turun sangat signifikan menjadi minus US\$ 24.431 miliar dan pada tahun 2013 triwulan II masih minus US\$ 9,848 miliar (BPS, 2012 dan 2013).
- b. Penurunan transaksi berjalan secara umum adalah disebabkan peningkatan nilai defisit transaksi berjalan barang. Kalau pada tahun 2009 total nilai impor barang total adalah US\$ 73,470 miliar sedangkan pada tahun 2012 melonjak sangat tajam menjadi US\$ 179,878 miliar sedangkan disisi ekspor pada tahun 2012 besarnya hanya US\$ 188,496 miliar. Dengan demikian impor barang mengalami peningkatan sebesar 53,5% selama 4 tahun atau rata-rata setiap tahun naik sebesar 13,375%. Impor barang didominasi oleh barang konsumsi, bahan baku dan bahan penolong industri dan barang modal. Barang konsumsi pada akhir tahun 2009 besarnya mencapai US\$ 88,714 miliar sedangkan pada akhir tahun 2010 meningkat menjadi US\$ 127,447 miliar artinya dalam 2 tahun meningkat 29,8% atau rata-rata setiap tahun naik 24,9%. Impor bahan baku dan bahan penolong industri pada tahun 2009 sebesar US\$ 61,700 miliar dan pada tahun 2010 meningkat menjadi US\$ 89, 823 miliar atau dalam 2 tahun rata-rata naik 31,3% atau setiap tahun naik rata-rata 15. 65%.(BPS, 2012 dan 2013).
- c. Kenaikan konsumsi BBM, apalagi Indonesia saat ini telah menjadi negara net impor. Net impor terus mengalami peningkatan. Kalau pada tahun 2009 net impor BBM adalah sebesar US\$ 4,016 miliar sedangkan pada tahun 2012 net impor meningkat signifikan menjadi US\$ 20,315 miliar berarti mengalami peningkatan sebesar 80,2% atau rata-rata setiap tahun naik sebesar 20,05% (BPS, 2012 dan 2013).
- d. Impor jasa masih terus mengalami defisit. Kalau pada tahun 2009 total impor jasa adalah US\$ 9,741 miliar, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi US\$ 10,331 miliar. Defisit pengeluaran jasa didominasi oleh biaya transportasi, biaya asuransi. Sedangkan yang masih defisit adalah biaya jasa keuangan, jasa komputer & informasi, jasa royalti dan imbalan lisensi, jasa personal, kultural & rekreasi dan jasa bisnis lainnya.

ANALISIS RINGKAS KONDISI EKONOMI INDONESIA

Transaksi berjalan atau current account (CA) merupakan pengurangan antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang & jasa. Secara matematis hubungannya dirumuskan sebagai : $CA = Ekspor (X) - Impor (M)$. Besar ekspor neto tergantung kepada pendapatan suatu negara yang mempengaruhi pengeluaran impor, dan tingkat pendapatan luar negeri atas barang ekspor. Tingkat permintaan luar negeri atas barang ekspor tergantung kepada nilai tukar riil, jika depresiasi riil naik maka akan berdampak kepada neraca perdagangan, maka net ekspor dapat dirumuskan sebagai : $NX = X (Y_f, R) - Q (Y, R) = NX (Y, Y_f, R)$. NX = Net ekspor atau surplus neraca perdagangan barang & jasa. X = tingkat ekspor, Y_f = pendapatan luar negeri, Q = volume ekspor dan R = tingkat depresiasi nilai tukar domestik. (Dorsbusch, Fischer ,1994).

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

Neraca Pembayaran atau Balance of Payment (BOP) adalah surplus neraca perdagangan (NX) ditambah dengan nilai surplus Capital Account (KA) nyaitu : $BOP = NX(Y, Y_f, R) + KA(id-if)$, dalam hal ini $NX =$ net neraca perdagangan merupakan fungsi pendapatan nasional (Y), pendapatan luar negeri (Y_f) dan nilai tukar (R). KA = capital account atau lalu lintas modal merupakan fungsi selisih suka bunga domestik (id) dan suku bunga luar negeri (if). (Dorsbusch, Fischer, 1994).

Dari analisis neraca berjalan (CA), net impor (NX) dan BOP tersebut diatas dengan memperhatikan statistik transaksi berjalan dari tahun 2008 hingga tahun 2012 maka permasalahan transaksi berjalan Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut : pertama, kinerja net ekspor sangat sulit ditingkatkan karena pengeluaran biaya impor yang terus meningkat. Kedua, kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan nasional, masih harus dibebani dengan kondisi perekonomian ketergantungan kepada luar negeri antara lain biaya pengeluaran untuk & jasa barang seterusnya ketergantungan tersebut memperburuk neraca perdagangan luar negeri. Ketiga, depresiasi riil untuk memperbaiki neraca perdagangan dalam upaya meningkatkan permintaan agregat tidak dapat dilaksanakan, karena sistem perekonomian Indonesia masih ketergantungan. Diawali oleh krisis ekonomi moneter di Thailand tahun 1997 yang kemudian merembet ke Indonesia, agar devisa tidak terkuras maka Pemerintah Indonesia sejak 14 Agustus 1997 menetapkan nilai tukar mengambang atau free floating exchange rate mengikuti pola pasar. Dengan sistem nilai tukar mengambang, dilain pihak net ekspor (NX) tidak dapat diharapkan membantu maka nilai tukar Rupiah secara berkelanjutan riskan untuk berfluktuasi.

Dengan kondisi tersebut maka untuk meningkatkan devisa menjadi tergantung kepada aliran modal melalui pasar modal dan kebijakan moneter negara maju terutama kepada kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Tetapi ketika The Fed merencanakan akan melaksanakan kebijakan pengurangan stimulus moneter (tapering off), langsung nilai tukar Rupiah goyah. Pada bulan Januari 2013 nilai Rupiah terhadap US\$ 9.600, kemudian pada Desember 2013 nilai Rupiah jatuh ke Rp 12,261 atau terdepresiasi sekitar 21,4% (Bisnis Indonesia, 30 Desember 2013). Demikian pula indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa Efek Jakarta mengikuti kinerja ekonomi domestik yang melemah dan spekulasi tapering off. Sejak 28 Desember 2012 hingga 24 Desember 2013, IHSG telah terkoreksi 113,85 poin (2,64%) menuju level 4.202, 83, padahal pada bulan Mei 2013 IHSG telah menembus 5.300 (Koran Tempo, 26 Desember 2013).

Dengan menggunakan rumus BOP tersebut diatas dapat kita lihat bahwa BOP Indonesia mempunyai permasalahan sebagai berikut : pertama, cenderung mendapat tekanan akibat kinerja neraca perdagangan (NX) masih lemah. Kedua, capital inflow (KA) senantiasa mendapat tekanan berat akibat dari : i) pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga, baik Pemerintah dan swasta yang sangat besar. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 22 Desember 2013, hutang luar negeri Indonesia (Pemerintah & Swasta) mencapai US\$ 262,4 miliar. Dengan posisi itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 29,5%, sedangkan rasio pembayaran utang (Debt Service Ratio/DSR) sudah menembus 39,10%. Sedangkan sebelum krisis DSR maksimum adalah 20 %. Selain itu rasio hutang terhadap ekspor sudah mencapai 120, 55% (Investor Daily, 30 Desember 2013). ii)

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

pembayaran biaya jasa & transportasi yang sangat besar. iii) kondisi pasar modal Indonesia sangat tergantung kepada pasar modal luar negeri terutama pasar modal Amerika Serikat, sehingga tingkat kestabilan pasar modal Indonesia selalu terganggu. iv) tingkat suku bunga domestik (id) Indonesia relatif sudah tinggi, sehingga upaya menarik capital inflow sangat terbatas dengan menggunakan instrumen tingkat suku bunga domestik (id). Kalau suku bunga domestik dinaikkan maka sektor riil akan terganggu.

Berbagai kebijakan ekonomi telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sejak awal pembangunan ekonomi yang serius, 1969. Pergeseran episentrum kekuatan ekonomi dunia dari Uni Eropah dan Amerika Serikat ke Asia dan prediksi PwC bahwa Indonesia dapat menyalib pertumbuhan negara maju seperti Jerman dan Inggris pada tahun 2050, sekaligus merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Modal negara dan bangsa Indonesia untuk meraih peluang mengikuti pergeseran episentrum kekuatan ekonomi ke Asia dan kemungkinan berhasil menyalib kekuatan ekonomi negara maju seperti Jerman dan Inggris secara logika memang dapat diterima. Pertama, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar dan melimpah, kedua, jumlah penduduk adalah no. 4 terbesar di dunia, ketiga, sumber daya manusia (SDM) mempunyai talenta yang baik. Keempat, Indonesia mempunyai azas pembangunan sangat strategis dan tetap masih relevan hingga saat ini yaitu "Trilogi Pembangunan". Trilogi Pembangunan Indonesia terdiri dari : i) Stabilitas nasional yang mantap dalam bidang politik dan ekonomi, ii) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan iii) Pemerataan pembangunan.

Tetapi permasalahan yang muncul di dalam perjalanan pembangunan perekonomian Indonesia adalah

implementasinya, baik strategi maupun operasional dalam mewujudkan azas "Trilogi Pembangunan Indonesia" tersebut, sejak pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Orde Reformasi saat ini. Walaupun Indonesia masih sangat butuh dan tergantung kepada PMA, kalau ketergantungan kepada PMA tersebut dikelola dengan mempedomani Trilogi Pembangunan Indonesia, maka peranan PMA harus memberi manfaat bagi pembangunan faktor-faktor determinan ekonomi Indonesia yaitu membawa dampak positif terhadap investasi domestik, nilai tukar, ekspor, impor dan neraca perdagangan.

Ketaatan terhadap azas Trilogi Pembangunan Indonesia adalah kewajiban Pemerintah dan merupakan alat serta merupakan gerakan yang sangat ampuh agar pembangunan ekonomi Indonesia mampu tumbuh berkesinambungan dan berkualitas serta secara bertahap dan pasti melepaskan diri dari ketergantungan negara-negara maju. Dilain pihak ketidaktaatan terhadap azas Trilogi Pembangunan Indonesia selama ini merupakan tindakan Pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah apakah bangsa ini akan terus membiarkan negara ini menjadi negara ketergantungan ekonomi terhadap negara lain ?

Pemilihan Umum anggota Legislatif tahun 2014 ini, sepatutnya merupakan kesempatan rakyat menentukan sikap untuk memilih anggota Legislatif berkualitas dan mempunyai integritas dan sosok negarawan yang baik. Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden tahun 2014 ini merupakan kesempatan rakyat menentukan sikap untuk memilih sosok Presiden & Wakil Presiden yang rela dan siap masa jabatan mereka diabdikan hanya dan hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

BAHASAN DAN DISKUSI

Melepaskan Indonesia dari ketergantungan Perekonomian Indonesia terhadap negara maju, hanya dapat diwujudkan oleh suatu Pemerintahan Nasional yang taat terhadap azas “Trilogi Pembangunan Indonesia” yang masih relevan hingga saat ini dan masa yang akan datang.

Ketaatan Pemerintahan Nasional terhadap azas “Trilogi Pembangunan Indonesia” berarti Pemerintah harus konsisten terhadap pembenahan permasalahan-permasalahan struktural yang masih terus terjadi sampai saat ini seperti birokratisasi & penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, penegakan hukum disemua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbaikan struktural negara akan meningkatkan kepercayaan dukungan dan semangat serta kebanggaan rakyat di segala bidang. Perbaikan struktural negara akan meningkatkan kepercayaan dan bargaining position di dalam pergaulan dunia internasional, seterusnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi, daya saing ekonomi dan ketahanan nasional Indonesia.

Walaupun Indonesia sangat membutuhkan PMA, PMA harus dikelola dengan berpedoman kepada Trilogi Pembangunan Indonesia, sehingga peranan PMA harus memberi manfaat bagi pembangunan faktor-faktor determinan ekonomi Indonesia antara lain membawa dampak positif terhadap investasi domestik, nilai tukar, ekspor, impor dan neraca perdagangan.

Pemerintah tidak perlu atau berharap banyak dari kucuran tricle down effect PMA. Dengan kebijakan PMA secara paralel Pemerintah harus terus mendorong pembangunan kekuatan ekonomi domestik khususnya sektor usaha kecil dan menengah

(UMKM). Kebijakan pembangunan UMKM harus merupakan kebijakan keberpihakan untuk mendorong peningkatan manajemen, keahlian, permodalan dan teknologi sehingga menjadi kekuatan ekonomi nasional riil yang tangguh.

Peningkatan PMA harus dapat mendorong pembentukan modal domestik antara lain menciptakan mitra usaha yang saling menguntungkan khususnya untuk memproduksi bahan baku dan bahan penolong industri bagi kebutuhan perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan net export dan daya saing ekspor baik yang dikelola oleh PMA maupun Penanaman Modal Domestik (PMD), Pemerintah Indonesia perlu menyusun langkah-langkah kebijakan paling sedikit sebagai berikut :

- 1) Fokus pengembangan produk ekspor harus yang berbasis kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia.
- 2) Meningkatkan daya saing ekspor secara konsisten, berkelanjutan antara lain menata struktur ekspor, meningkatkan ilmu pengetahuan & teknologi membangun R&D, meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produksi dan produktivitas kerja.
- 3) Meningkatkan daya saing bangsa dengan mengelola dan meningkatkan secara serius, konsisten dan sistematis faktor-faktor pendukung didalam negeri (endowment factors) meliputi : human resources, physical resources, knowledge resources, dan infrastructure.
- 4) Paling sedikit Indonesia harus meningkatkan 3 (tiga) nilai perdagangan (terms of trade) sekaligus meningkatkan nilai tambah (value added) sebagai berikut :
 - i) Commodity Terms of Trade atau $N = (P_x/P_m) 100\%$, artinya perekonomian

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM

Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

- Indonesia secara berkelanjutan harus meningkatkan jenis dan indeks harga komoditas ekspor (P_x) melebihi indeks harga komoditas impor (P_m).
- ii) Income Terms of Trade atau $I = (P_x/P_m).Q_x$, artinya perekonomian Indonesia secara berkelanjutan harus meningkatkan indeks volume ekspor (Q_x) sehingga pendapatan dalam komoditi ekspor Indonesia (I) mampu membayar kebutuhan impor atau pendapatan ekspor dapat melebihi pengeluaran untuk membayar impor.
- iii) Single Factor Terms of Trade atau mengukur jumlah impor yang dapat diterima yaitu $S = (P_x/P_m).Z_x$, artinya perekonomian Indonesia secara berkelanjutan harus meningkatkan indeks produktivitas (Z_x) sektor ekonomi atau sektor industri yaitu terus meningkatkan satuan unit faktor produksi domestik yang terkandung di dalam komoditas ekspor.
- 5) Untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap impor baik yang dilakukan oleh PMA maupun PMD, Pemerintah Indonesia perlu menyusun paling sedikit langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : i) Mendorong dan memfasilitasi dengan berbagai intensif agar PMA maupun PMD secara konsisten memproduksi bahan industri dan penolong industri untuk kebutuhan industri dalam negeri. ii) Menekan pengeluaran devisa untuk keperluan impor jasa antara lain, transportasi,

manajemen, asuransi dan konsultan asing dan lain sebagainya. iii) Melancarkan secara terus menerus Gerakan Membeli “Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri”. iv) Melakukan pengawasan secara konsisten praktker “Transfer Pricing Intercompany Account” khususnya terhadap perusahaan PMA dan Multi National Company (MNC).

SIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian ekonomi, daya saing ekonomi yang meningkat dan ketahanan nasional yang meningkat dan kuat dipastikan dapat meningkatkan kinerja neraca pembayaran dan neraca pembayaran (Balance of Payment) secara berkesinambungan, seterusnya akan bermuara kepada kestabilan ekonomi nasional.

Apabila Sumber Daya Manusia yang besar dengan talenta yang baik didukung pula dengan sumber daya alam yang melimpah, kemudian perekonomian dikelola oleh Pemerintahan yang efektif dan efisien maka dapat dipastikan akan bermuara kepada kesejahteraan negara, bangsa dan rakyat yang kita cintai dan banggakan. Cita-cita dan harapan hanya dan hanya dapat terwujud jika rakyat, bangsa dan negara Indonesia dapat memilih kepemimpinan (leadership) nasional yang tangguh dan amanah. Pemilihan Umum anggota Legislatif dan Presiden & Wakil Presiden tahun 2014 akan menjadi batu ujian bagi rakyat Indonesia. Semoga !

DAFTAR PUSTAKA

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM
Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta

Biro Pusat Statistik, 2012-7
Dalimunthe, ZA, Peranan Investasi Asing
Langsung (FDI) terhadap
Perekonomian Indonesia, Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi
Universitas Borobudur, 2004.

Dornbush Rudiger and Stanley Fischer,
Macro Economis, 1994
Gilpin Robert and Jean Millis Gilpin,
Tantangan Kapitalisme Global
Ekonomi Dunia Abad ke 21, 2002.
Salvatore Dominick, Ekonomi Internasional,
1997

*) Dr. Ir. Zainal Arifin Dalimunthe, MM
Dosen & Pengamat Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta